



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Peran Media Berita terhadap *Naming and Shaming* oleh
Amerika Serikat dalam Krisis Rohingya**

Skripsi

Oleh

Regina Virza Sadjati

2015330053

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Peran Media Berita terhadap *Naming and Shaming* oleh
Amerika Serikat dalam Krisis Rohingya**

Skripsi

Oleh

Regina Virza Sadjati

2015330053

Pembimbing

Sapta Dwikardana Ph.D

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



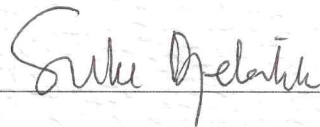
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Regina Virza Sadjati
NPM : 2015330053
Judul : Peran Media Berita Daring terhadap *Naming and Shaming* oleh Amerika Serikat dalam Krisis Rohingya


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 19 Juli 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

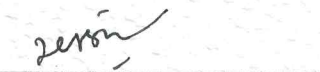
Ketua sidang merangkap anggota
Sukawarsini Djelantik, Ph.D

: 

Sekretaris
Sapta Dwikardana, Ph.D.

: 

Anggota
Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Regina Virza Sadjati
NPM : 2015330053
Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Peran Media Berita terhadap *Naming and Shaming*
oleh Amerika Serikat dalam Krisis Rohingya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung,

Regina Virza Sadjati

Nama : Regina Virza Sadjati
NPM : 2015330053
Judul : Peran Media Berita terhadap *Naming and Shaming* oleh Amerika Serikat dalam Krisis Rohingya

Abstrak

Kebijakan luar negeri tidak hanya berbentuk program pemerintah dan strategi, namun juga pernyataan verbal pemerintah dalam merespon suatu isu internasional. *Labeling* atau *naming and shaming* merupakan konsep yang mendukung pernyataan tersebut. Melabel suatu isu dengan kata atau istilah dapat memberikan dampak pada kebijakan luar negeri. Sementara media berperan sebagai sumber informasi yang dapat membentuk pemikiran masyarakat, mencerminkan pemikiran masyarakat, maupun merepresentasikan suatu isu. Pada 25 Agustus 2017, krisis Rohingya kembali menjadi perbincangan media berita, Amerika Serikat tidak memberikan label apapun terhadap krisis Rohingya, Namun, pada tanggal 22 November 2017 pemerintah Amerika Serikat melabel krisis Rohingya sebagai *ethnic cleansing*. Penelitian ini akan berfokus pada peran media berita daring dalam melakukan *framing* terhadap krisis Rohingya, sehingga pemerintah Amerika Serikat memberikan kebijakan untuk melabel krisis Rohingya. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana peran media berita daring pada *naming and shaming* oleh pemerintah Amerika Serikat dalam krisis Rohingya?. Dengan pendekatan Pluralisme dapat diteliti bagaimana media berita berperan dalam *framing* krisis Rohingya. Digunakan konsep *Policy – Media Interaction Model* untuk mengukur interaksi *framing* media dengan kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan media berita memiliki peran dalam upaya memberikan label terhadap krisis Rohingya dengan *framing* kejahatan kemanusiaan, namun pada penelitian ini ditunjukkan media tidak memiliki kuasa terhadap label apa yang akan diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat, karena pemerintah AS memiliki kepentingan terhadap pemerintah Myanmar.

Kata Kunci: Media Berita Daring, Krisis Rohingya, Amerika Serikat, Myanmar

Name : Regina Virza Sadjati
NPM : 2015330053
Title : *Online Media's Role on U.S Naming and Shaming in
Rohingya Crisis.*

Abstract

Foreign policy is not only government programs and strategies but also a verbal statement by the government as a response to international issues. Labeling an issue with a name or term at some degree can impact foreign policy. Media as the source of information has a role to shape, mirror, or representing an issue. On 25 August 2017, the Rohingya crisis is one of an issue that got media's attention because of its refugee crisis. Meanwhile, The United State would not give any label to the Rohingya crisis until 22 November 2017 when Rex Tillerson as the Secretary of State labeled Rohingya crisis as ethnic cleansing on his speech in addressing the issue. This research emphasized on how online news media framed Rohingya crisis to influence the US on naming and shaming the Rohingya crisis? Pluralism as a concept would be used in this research to explain how media influence the government to label the Rohingya crisis. Policy – Media Interaction model would be used to analyze the interaction of media framing and foreign policy. The result of this research shows that the news media does not have a role in labeling Rohingya crisis although the news media pressured the United States to finally give a label.

Key Words: Online News Media, Rohingya Crisis, United States of America, Myanmar.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Penelitian ini berjudul “Peran Media Berita Daring Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Krisis Rohingya”. Kebijakan Luar Negeri yang dibahas dalam penelitian ini terbatas pada label terhadap krisis Rohingya dan bagaimana media berita memiliki peran dalam proses *labeling*. Penelitian ini dibuat sebagai syarat kelulusan studi akademik program studi Hubungan Internasional. Namun, penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu peneliti menerima kritik, saran dan masukan dari pembaca agar peneliti dapat memperbaiki karya tulis ini dan tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang.

Peneliti berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi ilmu Hubungan Internasional serta bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 29 Mei 2019

Peneliti

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada orang tuaku terkasih Irma Armand dan Pancer Sadjati yang selalu sabar mendidik secara spiritual dan akademis, memfasilitasi baik secara finansial dan moril menghadapi segala keluh kesah dan cobaan dalam menghadapi saya sejak lahir hingga kini menyandang gelar Sarjana. Terimakasih atas segala pembekalan dan pembelajaran seumur hidup hingga aku menjadi manusia seutuhnya.

Terimakasih kepada kakak Rangga Wisesa yang selalu berbagi canda dan cerita, memahami segala situasi yang dihadapi, membimbing dikala gelap, merangkul dikala sedih, tanpamu kak aku tidak akan seperti sekarang.

Terimakasih kepada Yth. Mas Sapta Dwikardana Ph.d yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk membimbing saya, membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, jasa anda selamanya akan saya kenang.

Terimakasih kepada dosen penguji Mba Suke Djelantik dan Mba Jessica Martha yang telah membantu saya memahami kesalahan dan koreksi skripsi ini, sehingga kedepannya saya dapat memperbaiki yang salah dan mempertahankan yang benar.

Terimakasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu serta pengalaman selama saya menjadi mahasiswa UNPAR yang tentunya telah membantu saya lebih berkembang secara pribadi maupun secara akademis, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi semakin memahami. Pandangan-pandangan filosofis baik dalam bidang HI maupun dalam kehidupan akan menjadi fondasi dalam kepribadian saya dan akan selalu saya asah sepanjang hayat.

Terimakasih kepada seluruh staf administrasi TU yang selalu mempermudah urusan administrasi, juga kepada pekarya yang telah menyiapkan kelas dengan baik.

Terimakasih kepada Delima sahabat sejak TK yang selalu bersenda gurau kapanpun dan dimanapun dalam situasi apapun. Mengubah duka menjadi tawa, mengubah yang bosan menjadi menyenangkan.

Terimakasih kepada M. Iqbal Chairul. F. yang telah saling bertukar pikiran, cerita dan telah memberikan dukungan yang lebih dari cukup selama 2 tahun terakhir hingga kini kita sama-sama menyandang gelar Sarjana.

Terimakasih kepada Anastasya Salma dan Fitri Brilian yang selalu memberikan dukungan moral meminjamkan telinga, mengulurkan tangan sejak SMA hingga hari ini dan seterusnya.

Terimakasih kepada ka Ezra Amadeus yang selalu mendengar keluh kesah dan berbagai curhatan dari mulai drama perkuliahan hingga kehidupan, terimakasih atas bimbingan informal dari seminar hingga skripsi ini.

Terimakasih kepada teman teman HI 2015, khususnya Eldy K yang seringkali menggantikan posisi dosen 1 minggu menjelang ujian, Nabil RM,

Geraldi H, Vincentia Ratih, Bagus. I. Jordan, Jessica Vidi, Vina Septiana, Milzam, M, Sannia Aprinsa, Farras Terry, Sabina C, Valentina Sari, Lutfi P, Gabriella Evangelista, Gabriella Esther, Alexander Gavana terimakasih atas persahabatan, perhatian, bantuan serta sapaan pagi, siang, dan malamnya 2015-seterusnya.

Terimakasih kepada keluarga besar URS (Unpar Radio Station) atas pengalaman dan segala kegiatan pembekalan selama aktif UKM.

Akhir kata terimakasih kepada seluruh teman-teman yang mungkin belum sempat disebutkan namanya, doaku menyertai anda semua.

Daftar Isi

Abstrak	iii
Abstract.....	iv
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	4
1.2.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Kerangka Pemikiran	6
1.5 Kajian Literatur.....	14
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metode Penelitian.....	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20
BAB III PERAN MEDIA BERITA TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI..	22
2.1 Analisa Media Berita (CNN, Washington Post dan The New York Times) dalam krisis Rohingya.	22
2.1.1 Analisa Artikel Berita dalam Krisis Rohingya.....	24
2.1.2 Analisa Isu Yang Diangkat oleh Media Berita	39
BAB IV PERAN MEDIA BERITA AMERIKA SERIKAT DALAM MERESPON (NAMING AND SHAMING) TERHADAP KRISIS ROHINGYA.	45
3.1 Sejarah Singkat Hubungan Amerika Serikat dengan Myanmar	45
3.1.1 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Rohingya.....	47
3.2 Analisa Pernyataan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Krisis Rohingya 48	
3.2.1 Analisa Konferensi Pers Dengan Penasihat Negara Burma Aung San Suu Kyi (<i>Joint Press Availability with Burmese State Counsellor Aung San Suu Kyi</i>).	49
3.2.2 Usaha Untuk Merespon Krisis Burma di Daerah Rakhine (<i>Efforts to</i> <i>Address Burma's Rakhine State</i>).....	55

3.3 Analisa Interaksi Media – Kebijakan	60
BAB IV	64
Daftar Pustaka	66

Daftar Tabel

Tabel 1 Roger Hilsman, Concentric Circles of Foreign Policy Making, Essentials of U.S. Foreign Policy Making Process, Pearson, New Jersey (2014).	8
Tabel 2 Piers Robinson, The Policy-Media Interaction Model: Measuring Power during Humanitarian Crisis, Journal of Peace Research (2000)	11
Tabel 3 Analisa diskursus Joint Press Availability with Burmese State Counsellor Aung San Suu Kyi.....	53
Tabel 4 Indeks kata kunci analisa diskursus Joint Press Availability with Burmese State Counsellor Aung San Suu Kyi	54
Tabel 5 Usaha Untuk Merespon Krisis Burma di Daerah Rakhine (Efforts to Address Burma's Rakhine State)	59
Tabel 6 Indeks Kata Kunci Usaha Untuk Mengalamatkan Krisis Burma di Daerah Rakhine (Efforts to Address Burma's Rakhine State)	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis kemanusiaan kepada etnis minoritas Rohingya yang beragama Islam di Rakhine, Myanmar merupakan salah satu isu penting pada tahun 2017. Konflik bermula pada serangan balik atau *counter attack* terhadap Rohingya oleh pemerintah Myanmar atas dasar melawan militan *The Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) yang telah melakukan serangan terhadap 30 pos polisi pada 25 Agustus 2017.¹ Secara geografis Rakhine merupakan wilayah bagian Myanmar. Namun demikian, kewarganegaraan etnis Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Pada tahun 2014, pemerintah Myanmar tidak mengikutsertakan etnis Rohingya dalam sensus penduduk, mengklaim etnis Rohingya bukan masyarakat Myanmar.² Etnis Rohingya di Rakhine telah mengalami ketidakadilan cukup lama sehingga memicu konflik dengan pemerintah. Tercatat sekitar 727.000 masyarakat Rohingya yang mengungsi di perbatasan Cox Bazar, Bangladesh pasca terjadinya konflik kekerasan.³

Dalam menanggapi krisis kemanusiaan media berita memiliki peran untuk menyuarakan keadaan di daerah berkonflik hingga sebuah institusi atau negara akan

¹ *BBC News, Myanmar Rohingya: What you need to know about the crisis*, BBC News, 24 April 2018, diakses pada <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561>, 27 September 2018.

² Faisal Edroos, *ARSA: Who are the Arakan Rohingya Salvation Army?*, Aljazeera, 13 September 2017, diakses pada <https://www.aljazeera.com/news/2017/09/myanmar-arakan-rohingya-salvation-army-170912060700394.html>, 28 September 2018.

³ Rohingya Refugee Crisis, UNOCHA, diakses pada <https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis>, 24 Februari 2019.

memberikan respon. Steven Livingston, seorang Professor dalam kajian media dan hubungan internasional, berargumen media berita memiliki peran dalam meliput krisis kemanusiaan sehingga mendorong tindakan intervensi militer atau membuat suatu kebijakan yang kemudian dikenal dengan konsep *CNN Effect*.⁴

Media berita internasional meliput krisis Rohingya sehingga pemerintah dari berbagai negara khususnya negara-negara islam memberikan respon terhadap krisis di Rakhine. Atas dasar nilai-nilai demokrasi dan liberal yang dipegang teguh oleh Amerika Serikat, negeri Paman Sam memberikan tanggapan terhadap krisis Rohingya serta memberikan sejumlah donasi kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya kepada pemerintah Bangladesh yang telah menampung pengungsi Rohingya.⁵ Amerika Serikat juga pernah terlibat dalam beberapa krisis kemanusiaan, diantaranya krisis Kosovo, Darfur dan Somalia.⁶

Seiring perkembangan zaman, pemberitaan daring menduduki posisi kedua⁷ sebagai referensi berita dan informasi baik domestik maupun internasional bagi masyarakat Amerika Serikat.⁸ Menurut Aeron Davis, media berita juga merupakan

⁴ Steven Livingston, *CLARIFYING THE 'CNN EFFECT': An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention*, Research Paper R-18, Juni 1997, Harvard University John F. Kennedy School of Government.

⁵ Committee on Foreign Affairs, *The Rohingya Crisis: U.S. Response To The Tragedy In Burma*, October 5, 2017, Serial No. 115-99.

⁶ Ibid.

⁷ Media berita televisi masih menjadi sumber berita dan informasi nomor satu di Amerika Serikat.

⁸ Amy Mitchell, Elisa Shearer, Jeffrey Gottfried and Michael Barthel, *The Modern News Consumer: News attitudes and practices in the digital era*, Pew Research Center, 7 Juli 2016, di perbaharui ada September 2017, diakses pada <http://www.journalism.org/2016/07/07/the-modern-news-consumer/>, 24 Februari 2019.

sumber informasi yang seringkali digunakan (namun tidak menjadi sumber utama informasi) oleh pemerintah.⁹

Kebijakan luar negeri merupakan bentuk nyata relasi antara sebuah negara dengan institusi atau negara lain untuk mencapai tujuan tertentu, penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk melabel krisis Rohingya. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam krisis Rohingya menarik untuk diteliti karena sejarah Amerika Serikat yang memiliki peran dalam krisis kemanusiaan. Kebijakan Luar Negeri tidak terbatas pada program pemerintah saja, namun juga pernyataan resmi serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁰ Untuk mengkaji kebijakan luar negeri melabel krisis Rohingya, peneliti akan melakukan analisa diskursus. Sementara, kajian peran media berita akan diteliti dengan *framing analysis*, konsep *framing* dan *Policy Media Interaction Model*. Maka atas pemaparan latar belakang diatas judul penelitian ini adalah “Peran Media Berita terhadap *Naming and Shaming* oleh Amerika Serikat dalam Krisis Rohingya”.

1.2 Identifikasi Masalah

Amerika Serikat memberikan respon pertama kali terhadap krisis Rohingya dalam rapat dewan pada tanggal 5 Oktober 2017¹¹, yaitu dua bulan setelah pemberitaan krisis yang menimpa etnis minoritas Rohingya. Tidak ada tindakan

⁹ Aeron Davis, *The Mediation of Power: A Critical Introduction*, Pg. 100, Routledge, (2007). hal. 2-16.

¹⁰ Committee on Foreign Affairs, *The Rohingya Crisis: U.S. Response To The Tragedy In Burma*, October 5, 2017, Serial No. 115-99.

¹¹ Ibid.

signifikan seperti intervensi kemanusiaan atau pernyataan keras kepada pemerintah Myanmar hingga 22 November 2017. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan donasi melalui USAID.¹² Pernyataan formal dinyatakan oleh kementerian luar negeri Amerika Serikat atau *Department of States* dilakukan pada tanggal 15 November 2017 dan 22 November 2017 dalam upaya mengalamatkan krisis Rohingya.

Dalam penelitian ini, akan dibahas peran media berita melakukan *frame* terhadap krisis Rohingya sehingga pemerintah Amerika Serikat memberikan respon berupa label kepada krisis Rohingya. Mulanya peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh pemberitaan media berita Amerika Serikat dalam krisis Rohingya terhadap masyarakat AS, namun demikian, tidak terdapat gerakan dari masyarakat untuk menjadikan krisis Rohingya sebagai urgensi bagi pemerintah Amerika Serikat. Peneliti melihat celah, meskipun tidak terdapat urgensi dari masyarakat, media berita Amerika Serikat tetap menyiarkan berita krisis Rohingya melalui *framing* agar dipertimbangkan sebagai isu yang penting. Sehingga, pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah “Bagaimana peran media berita daring pada *naming and shaming* oleh pemerintah Amerika Serikat dalam krisis Rohingya?.”

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar peran media berita terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam melabel

¹² Loc.cit.

krisis kemanusiaan Rohingya. Media berita yang dianalisa terbatas pada tiga media berita saja yaitu CNN, The New York Times dan Washington Post, sementara media berita daring memiliki tiga analisa yang dilakukan peneliti pada media berita terbatas pada pemberitaan daring yang dipublikasikan secara teks. Pembatasan pada ketiga media tersebut dikarenakan keterbatasan akses, serta waktu untuk menganalisa lebih dari tiga media berita.

Peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini sejak tanggal 25 Agustus 2017 ketika konflik antara pemerintah Myanmar dan Rohingya diliput secara ekstensif oleh media berita hingga 22 November 2017 ketika pemerintah Amerika Serikat melabel krisis Rohingya. Kebijakan luar negeri yang dibahas oleh peneliti terbatas pada pernyataan pemerintah Amerika Serikat dalam melabel krisis Rohingya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang muncul berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan berusaha peneliti jawab di dalam penelitian ini adalah **Bagaimana peran media berita daring pada *naming and shaming* oleh pemerintah Amerika Serikat dalam krisis Rohingya?**.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menganalisa bagaimana peran media berita daring teks melakukan *framing* sehingga pemerintah Amerika Serikat memberikan *naming and shaming* dalam krisis Rohingya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan pengaplikasian dari pembelajaran yang peneliti dapatkan selama menuntut ilmu di UNPAR. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan inspirasi tentang pengaruh media berita di dunia hubungan internasional dengan contoh kasus krisis kemanusiaan terkini, sehingga pembaca dapat memahami lebih dalam serta merasakan keterikatan dengan kasus yang disediakan oleh peneliti.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam meneliti topik penelitian ini, digunakan perspektif Pluralisme dalam HI yang disampaikan oleh Ali Shakoori pada artikel dalam jurnal berjudul *Pluralism; an Old but New Phenomenon in Socio-political Processes*.¹³ Pluralisme menurut Ali Shakoori merupakan sebuah model demokrasi yang memberikan kesempatan bagi aktor lain untuk ikut andil di dalam pembuatan kebijakan dalam menanggapi suatu isu sesuai dengan kepentingan dan sumber daya atau *resource* (tidak terbatas pada sumber daya finansial) yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan.¹⁴ Shakoori mengutip Nicholls (1975) *all political activity is the result of group pressure. Therefore the political process "is concerned with the adjustment of conflicting interests manifesting themselves in group antagonisms."*¹⁵ Pemaparan

¹³ Ali Shakoori, *Pluralism; an Old but New Phenomenon in Socio-political Processes*, International Journal of Social Sciences (IJSS), Vol. 4, No.4 (2014). Hal. 23-24.

¹⁴ Loc.cit.

¹⁵ Ali Shakoori, *Pluralism; an Old but New Phenomenon in Socio-political Processes*, International Journal of Social Sciences (IJSS), Vol. 4, No.4 (2014). Hal. 23-24.

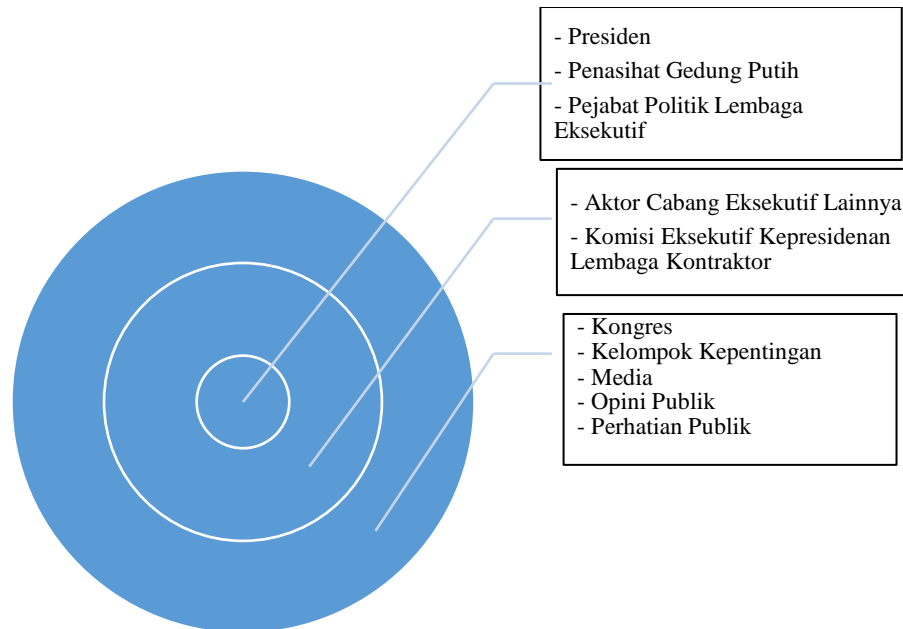
Nicholls tentang Pluralisme menunjukkan adanya pengaruh dari aktor lain atau yang ia sebut sebagai *pressure group*.¹⁶

Kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor input dan output dalam proses pembuatannya. Tekanan domestik merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri. Sirkulasi pembuatan kebijakan luar negeri menurut Carter adalah *input* atau masukan, *decision making* atau proses pembuatan kebijakan, *output* atau keluaran, *outcomes* atau hasil, kemudian *feedback* atau umpan balik dan kemudian kembali lagi ke proses *input* dan seterusnya.¹⁷ Carter menggunakan model *Concentric Circles of Foreign Policy Making* oleh Roger Hilsman untuk menjelaskan posisi aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ralph G. Carter, *Essentials of U.S. Foreign Policy Making*, Pearson, New Jersey (2015). Hal. 2-7.

(Carter 2014)



Tabel 1 Roger Hilsman, *Concentric Circles of Foreign Policy Making, Essentials of U.S. Foreign Policy Making Process*, Pearson, New Jersey (2014).

Input yang dimaksud oleh Carter merujuk pada kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan sebagaimana dikutip dari Roger Hilsman, beberapa kebijakan luar negeri merupakan hasil dari lembaga eksekutif, beberapa lainnya merupakan interaksi antar kepentingan pemerintah dan organisasi non pemerintah, kongres, penasihat presiden formal maupun informal, representatif kelompok kepentingan, kepentingan publik yang lebih luas, perhatian pemimpin luar negeri, bahkan terkadang kepentingan kejaksaan federal.¹⁸ Seluruh proses pembuatan kebijakan luar negeri ini diliput oleh media berita nasional, dalam

¹⁸ Ralph G. Carter, *Essentials of U.S. Foreign Policy Making*, Pearson, New Jersey (2015). Hal. 2-7.

beberapa kasus media dapat menjadi faktor yang menentukan apakah suatu kebijakan akan dibuat dan bagaimana prosesnya.¹⁹

Atas dasar perspektif pluralisme, media sebagai salah satu aktor politik memiliki peran dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Namun, Steven Livingston menyatakan pesimis atas peran media dalam pembuatan kebijakan, seperti contoh meskipun Steven Livingston berargumen *CNN Effect* merupakan konsep yang menjelaskan kemampuan media mengangkat suatu isu sehingga pemerintah memberikan respon dengan membuat kebijakan, namun demikian Livingston juga menyatakan media memang memberikan masukan dan mengangkat suatu isu, tetapi pemerintah tetap memiliki kuasa penuh atas kebijakan apa yang akan dikeluarkan.²⁰ Kekurangan *CNN Effect* sebagai sebuah konsep adalah ketidakmampuannya untuk mengukur seberapa besar peran media terhadap kebijakan. Piers Robinson mengisi kekosongan konsep *CNN Effect* dengan Konsep *Policy–Media Interaction Model* atau Model Interaksi Kebijakan–Media.

Konsep *Policy–Media Interaction Model* menjelaskan bagaimana cara mengukur kekuatan media untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan ketika menghadapi isu krisis kemanusiaan. Robinson menjelaskan ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1) *policy uncertainty* atau ketidak pastian kebijakan, dan 2) *critically frame media coverage that empathizes with suffering people* atau

¹⁹ Ibid.

²⁰ Steven Livingston, *CLARIFYING THE ‘CNN EFFECT’: An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention*, Research Paper R-18, Juni 1997, Harvard University John F. Kennedy School of Government.

framing berita dengan sangat menunjukkan terdapatnya orang yang menderita akibat krisis.²¹ Berikut bagan konsep Model Interaksi Kebijakan–Media:

Model Interaksi Kebijakan–Media

(Robinson 2000)		Garis Kebijakan	Arah Pengaruh	Pengaruh Tayangan	Hubungan Kebijakan-Media
Skenario 1	Terdapat Pengaruh media	Tidak Pasti	<=	Ekstensif dan Kritis	Dalam skenario adanya pengaruh media dan garis kebijakan yang diartikulasikan dengan baik, pemerintah rentan akan serangan kritikan dan perhatian media secara ekstensif. Jika pemberitaan di'frame' secara kritis, mengadvokasikan sebuah tindakan yang spesifik, pemerintah secara terpaksa akan melakukan sesuatu atau akan menghadapi hubungan dengan publik yang buruk. Pada Skenario ini dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan secara signifikan.
Skenario 2	Tidak ada pengaruh media	Pasti	=>	Indeks sesuai 'agenda resmi'	Ketika pemerintah memiliki kebijakan yang jelas dan sesuai dengan objektif dan artikulasi yang disusun dengan baik pemberitaan

²¹ Piers Robinson, *The Policy-Media Interaction Model: Measuring Power during Humanitarian Crisis*, *Journal of Peace Research* (2000) 37: 613, doi: 10.1177.0022343300037005006. Hal. 615.

					akan sesuai dengan agenda. Pemberitaan mungkin akan memberikan kritikan jika adanya disensus antar elit. Dengan para eksekutif memiliki tujuan aksi yang pasti, pemberitaan media kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi pembuatan kebijakan.
--	--	--	--	--	--

Tabel 2 Piers Robinson, *The Policy-Media Interaction Model: Measuring Power during Humanitarian Crisis*, *Journal of Peace Research* (2000)

Pada skenario pertama, dijelaskan bahwa jika terdapat kebijakan yang alur serta maksud dan tujuannya tidak jelas (*uncertain*) maka media akan meliput berita tersebut dengan nilai-nilai empati yang lebih dari biasanya (*framing*) agar pemerintah mau mulai bergerak untuk melakukan sesuatu terhadap kebijakan tersebut.²² Pada skenario kedua, dipaparkan ketika pemerintah memiliki kebijakan yang jelas dan sesuai dengan objektifnya, media hanya akan mengkritisi isu jika ada pihak elit yang memperdebatkannya, mediapun akan mengikuti agenda sesuai dengan agenda yang telah disediakan pemerintah. Konsep ini selaras dengan topik penelitian.²³

Media menurut Hodkinson dapat dilihat dari tiga perspektif yaitu *shaping* atau pembentuk, *mirroring* atau cermin, dan *representing* atau merepresentasikan

²² Ibid.

²³ Loc.cit.

suatu isu.²⁴ Media sebagai pembentuk dimaknai dengan bagaimana media sebagai sumber informasi memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Media sebagai cermin menunjukkan bagaimana media hanya mencerminkan apa yang terjadi pada masyarakat tanpa memberikan timbal balik apapun. Sementara, media sebagai representasi menunjukkan bagaimana interaksi antara media dan masyarakat yang saling bertukar informasi, sehingga media dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Menurut Hodkinson, dalam beberapa empasis seperti pemberitaan tentang suatu opini, tema tertentu, suatu kejadian atau kegiatan dalam media secara repetitif dan konsisten, dapat mempengaruhi sikap di masa depan, identitas, tindakan dan pola sosial tertentu.²⁵

Framing merupakan elemen penting dalam *Policy-Media Interaction Model*, namun demikian *framing* dapat didefinisikan sebagai konsep maupun sebagai metode. Dietram A. Scheufele seorang ahli dalam bidang komunikasi menjelaskan *Framing* sebagai teori didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika media berita tidak hanya membuat suatu isu menjadi penting, namun juga membuat konstruksi sosial atau nilai-nilai sosial terhadap suatu isu sehingga pembaca dapat memberikan nilai negatif ataupun positif terhadap isu yang diangkat.²⁶ Hal ini berkaitan dengan penjelasan Hodkinson tentang media dalam empasis tertentu dapat mempengaruhi sikap terhadap isu tertentu.²⁷

²⁴ Paul Hodkinson, *Media, Culture, and Society: an Introduction*, Sage (2011). Hal. 15-22

²⁵ Ibid.

²⁶ Dietram A. Scheufele, *Framing as a Theory of Media Effects*, Journal of Communication Vol. 49 issue 1 (1999). Hal. 104-106.

²⁷ Loc.cit.

Meliput berita (dalam konteks penelitian ini *framing*), jurnalis memiliki kode-kode etik dan regulasi yang perlu dipenuhi untuk menjaga akuntabilitas baik perusahaan media maupun jurnalis secara individu. Sesuai dengan standar perilaku profesional jurnalis yang tertera dalam hukum internasional *Declaration of Principles on the Conduct of Journalism*²⁸, terdapat berbagai macam kode etik atau prinsip-prinsip jurnalistik yang isinya jika dirangkum sebagai berikut: menghormati kebenaran, mempertahankan prinsip kebebasan dalam mengumpulkan dan mempublikasikan berita secara jujur, faktual, adil, menjaga kerahasiaan sumber yang rahasia, menghindari diskriminasi, menghindari plagiarisme serta pelanggaran terhadap segala bentuk kecurangan dalam meliput berita.²⁹ Namun untuk memahami artikel berita dalam penelitian ini digunakan pengertian kode etik jurnalis menurut Christopher Frost dalam buku *Journalism: Ethics and Regulation*.

Peneliti akan menggunakan konsep *Naming and Shaming* yang menjelaskan pernyataan pemerintah terhadap suatu isu merupakan hal yang penting, karena dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan.³⁰ Dengan memberikan label atau *naming and shaming* negara memberikan tanggapan terhadap suatu isu, namun memberikan *naming and shaming* dipengaruhi oleh kepentingan negara terhadap aktor lain yang mungkin terpengaruh oleh label tersebut.³¹ *Naming and shaming* dalam konteks hak asasi manusia berarti mengelompokkan atau menyebarkan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran hak asasi

²⁸ Chris Frost, *Journalism: Ethics and Regulation*, Pearson, Ed. 3, Essex, England (2011).

²⁹ Ibid.

³⁰ H. Richard Friman, *The Politics of Leverage in International Relations: Name, Shame, and Sanction*, Palgrave MacMillan, New York (2015). Hal 105-121.

³¹ Ibid.

manusia sehingga aktor-aktor lain (biasanya pemerintah negara lain) memberikan istilah atau nama (*naming*) sehingga negara pelaku pelanggaran HAM menghentikan tindakan yang melanggar HAM (*shaming*).³²

Dalam memberikan label atau *naming and shaming* terhadap suatu isu, negara mempertimbangkannya berdasarkan kepentingan nasional negara pemberi label terhadap negara penerima label.³³ Menurut Joseph Frankel, ada dua konteks dalam melihat kepentingan nasional, pertama secara operasional dan kedua secara aspirasional.³⁴ Secara operasional kepentingan nasional diidentifikasi sebagai jumlah total kepentingan dan kebijakan luar negeri yang diberikan sebuah negara, biasanya kebijakan berjangka singkat atau *short term interests*, berbentuk deskriptif dan sistematis. Sementara secara aspirasional kepentingan nasional bersifat normatif dan jangka panjang atau *long term interests*, mengacu kepada ideologi dan sejarah, sebuah visi kehidupan yang baik, serta suatu tujuan yang ideal dan mungkin dapat dicapai oleh sebuah negara. Dalam penelitian ini digunakan kepentingan nasional dalam konteks aspirasional.

1.5 Kajian Literatur

Keterlibatan Amerika Serikat dalam krisis kemanusiaan memiliki keterikatan dengan peran media sebagai pembentuk opini publik. Fungsi media sebagai pengawas kebijakan pemerintah ataukah media merupakan bagian dari

³² Loc.cit. Hal. 43-44.

³³ H. Richard Friman, *The Politics of Leverage in International Relations: Name, Shame, and Sanction*, Palgrave MacMillan, New York (2015). Hal 105-121.

³⁴ Joseph Frankel, *Key Concepts in Political Science: National Interest*, Palgrave Mamillan, UK (1970). Hal. 15-20.

pengaturan agenda pemerintah kian diperdebatkan. Edward S. Herman pada artikel dalam jurnal berjudul “*The Media’s Role In U.S Foreign Policy*” memaparkan tumpang tindih fungsi media dengan kenyataan pola media berita meliput kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Herman mengkaji contoh kasus Perang Teluk Persia pada tahun 1991 yang dianalisa berdasarkan tiga fase secara kronologi waktu, namun kajian literatur ini hanya akan membahas fase pertama. Agustus 1990 sampai 15 Januari 1991 ketika pemerintah Irak melakukan invasi terhadap Kuwait, pemerintah dibawah administrasi Bush segera melakukan invasi dengan cara memaksa Saddam Husein selaku Presiden Irak untuk meninggalkan Kuwait. Sementara itu duta besar Amerika Serikat, April Glaspie telah menyatakan Amerika Serikat tidak memiliki opini apapun terkait konflik Irak dan Kuwait. John Kelly, Asisten Menteri Luar Negeri juga menyatakan Amerika Serikat tidak memiliki kewajiban apapun untuk mempertahankan Kuwait.³⁵

Herman menjelaskan terdapat penerapan *double standard*³⁶ oleh administrasi Bush terhadap pemerintah Irak. Media diminta untuk tidak melakukan peliputan berita terkait isu *double standard* Irak dan Kuwait yang dilakukan oleh Amerika Serikat, karena dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait tindakan agresi yang dilakukan administrasi Bush. Herman juga menjelaskan

³⁵ Edward S. Herman, *The Media’s Role In U.S. Foreign Policy*, Journal of International Affairs, Vol. 47, No. 1, POWER OF THE MEDIA IN THE GLOBAL SYSTEM, (Summer 1993). Pg. 23-45.

³⁶ *Double standard* adalah aturan ataupun prinsip prinsip yang secara tidak adil berlaku kepada satu aktor namun belum tentu berlaku bagi aktor lainnya. Double Standard, Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/double-standard>.

bahwa media berita Amerika Serikat berperan membuat propaganda negatif dengan meliput berita-berita yang tidak terverifikasi seperti contoh pemerintah Irak memindahkan ribuan bayi dari inkubator di rumah sakit Kuwait.³⁷

Edward S. Herman menggarisbawahi tentang media *mainstream* cenderung tunduk kepada agenda pemerintah. Peneliti artikel dalam jurnal sekaligus ahli media tersebut menutup penelitiannya dengan kesimpulan media berita Amerika Serikat telah meninggalkan kewajiban media untuk memberikan informasi demi demokrasi. Analisa Herman juga terlihat pesimis akan peran media di dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Liselotte Olsson dan Irina Bernebring Journiette melakukan penelitian yang berjudul *Media and Humanitarian Intervention: A Study of the 'CNN Effect' and the United States Foreign Policy Making in the Context of Somalia and Darfur*. Kedua peneliti tersebut menganalisa tentang 'CNN Effect' yang terjadi di Somalia dengan pendekatan model interaksi media-kebijakan. 'Operation Restore Hope' merupakan bentuk kebijakan luar negeri yang merespon pemberitaan media berita tentang bagaimana pengemasan berita di Somalia menggarisbawahi terjadinya perang sipil yang mengakibatkan krisis pada kesehatan masyarakat Somali. Krisis kesehatan tersebut menyebabkan setidaknya 300.000 jiwa meninggal, dan 3.000 lainnya mati perlahan akibat kelaparan serta malnutrisi pada tahun 1992-93.³⁸

³⁷ Loc.Cit.

³⁸ Liselotte Olsson, Irina Bernebring Journiette, Lunds Universitet, *Media and Humanitarian Intervention: A Study of the 'CNN Effect' and the United States Foreign Policy making in the Context of Somalia dan Darfur* (2007), diakses pada <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1319933>, 18 September 2018.

Dalam penelitian Olsson dan Journiette, dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat merupakan aksi nyata sebuah kebijakan luar negeri dengan “*Operation Provide Relief*”, atau operasi yang diperuntukkan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Somalia, Presiden Amerika Serikat juga memberikan pernyataan empati “*When we see Somalia’s children starving, all of America hurts.*” – George Bush (1993)³⁹. Namun demikian, tidak ada tindakan militer, politik maupun faktor logistik yang berubah di Somalia pada jenjang waktu ketika pernyataan Amerika Serikat tidak melakukan intervensi hingga bulan November ketika Amerika Serikat melancarkan operasi intervensi kemanusiaan “*Operation Restore Hope*”.⁴⁰

Cara media menyampaikan berita terus berubah-ubah, mulanya pada “*Operation Provide Relief*” media memberitakan kasus yang terjadi kepada warga di Somalia secara intensif, kemudian ketika “*Operation Restore Hope*” berjalan, media berita Amerika Serikat meminimalisir pemuatan berita tentang keadaan yang terjadi di Somalia namun menayangkan berita yang berisi tentang penculikan dan kekerasan yang dilakukan terhadap tentara Amerika Serikat membuat masyarakat mengisi pemungutan suara agar pemerintah Amerika Serikat mengundurkan diri dari keterlibatannya pada krisis Somalia.⁴¹

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Loc.cit.

⁴¹ Liselotte Olsson, Irina Bernebring Journiette, Lunds Universitet, *Media and Humanitarian Intervention: A Study of the ‘CNN Effect’ and the United States Foreign Policy making in the Context of Somalia dan Darfur* (2007), diakses pada <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1319933>, 18 September 2018.

Argumen yang disampaikan Olsson dan Journiette, membenarkan pernyataan Robinson tentang *CNN Effect*, media berita memiliki pengaruh besar terhadap suatu kebijakan, namun demikian media berita tidak bisa dengan mudah mempengaruhi tindakan sebuah negara dengan penggunaan kekuatan. Argumen Olsson dan Journiette juga dibenarkan oleh Daniel Fitzsimmons pada artikel dalam jurnal berjudul *Media Power and American Military Strategy: Examining The Impact of Negative Media Coverage On Us Strategy In Somalia and the Iraq War*.

Menurut Fitzsimmons, pemberitaan media tentang krisis kemanusiaan di Somalia tidak dapat mempengaruhi strategi militer Amerika Serikat yang sudah tersusun dengan objektif secara jelas dan pasti. Selain itu, Fitzsimmons juga mengkaji tentang proses bagaimana media meliput berita di Somalia.⁴² Namun, penelitian Fitzsimmons dalam *Media Power and American Military Strategy: Examining The Impact of Negative Media Coverage On Us Strategy In Somalia and the Iraq War* membahas juga perang Iraq yang mengatasnamakan intervensi kemanusiaan.

Berdasarkan pemaparan kajian literatur diatas maka dapat disimpulkan *CNN Effect* memiliki pengaruh namun tidak terlalu besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Konsep *CNN Effect* diuji baik oleh Olsson dan Journiette, Hermann maupun Fitzsimmons. Penggunaan konsep *Policy-Media Interaction Model* membantu Olsson dan Journiette dalam menganalisis peran media berita terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait krisis Somalia.

⁴² Daniel Fitzsimmons, *Media Power and American Military Strategy: Examining The Impact Of Negative Media Coverage On US Strategy In Somalia and The Iraq War*, *Innovations: A Journal of Politics* (2006), Vol 6, Centre for Military and Strategic Studies University of Calgary.

Dibandingkan dengan penelitian Hermann dan Fitzsimmons yang tidak menggunakan konsep *policy-media interaction model*. Sehingga mengambil contoh dari ketiga artikel dalam jurnal yang telah dikaji, peneliti melihat kemudahan dalam analisa jika menggunakan konsep *policy-media interaction model* dalam mengkaji penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti akan mengkaji data sekunder untuk menjadi sumber informasi serta menganalisis data. Data sekunder yang disajikan adalah analisa konsistensi *framing* dalam konten berita pada media massa CNN, The New York Times, dan Washington Post. Kemudian, mengumpulkan data, mengolah data, serta menghasilkan data yang menjelaskan tentang topik yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan berupa berita dari sumber-sumber yang kredibel, informasi resmi dari pemerintah, penelitian akademis.⁴³ Dalam menganalisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang bersifat verbal berupa pernyataan resmi pemerintah digunakan Analisis diskursus.⁴⁴ Analisis diskursus penting untuk menganalisa pilihan kata atau kalimat untuk mencari makna yang terkandung di dalam sebuah konten.⁴⁵ Dalam penelitian ini, konten yang akan dikaji adalah pernyataan resmi pemerintah yang dipublikasikan langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Untuk menganalisa *framing* media

⁴³ C.R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, (New Age International (P), Limited, New Delhi, (2004).

⁴⁴ Paul A. Chilton, dan Schaffner, Christina, *Politics as Text and Talk: Analytic approaches to political discourse*, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia (2002).

⁴⁵ Ibid.

terhadap krisis Rohingya akan digunakan *framing analysis* yaitu menganalisa bagaimana media mengemas berita dan mengangkat isu dalam suatu konten berita.⁴⁶ Arti serta makna akan diteliti berdasarkan kamus bahasa Inggris, kamus hubungan internasional, serta kamus hukum internasional.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan metode kualitatif, peneliti menggunakan teknik studi literatur dengan mengumpulkan dokumen serta data-data tertulis sebagai sumber informasi untuk dianalisa. Data yang didapat dari media berita harus kredibel dan terpercaya. Pengaplikasian analisis *framing* berdasarkan 3 media berita yaitu CNN, Washington Post dan The New York Times. Dari masing-masing media berita akan dipilih 5 artikel berita berdasarkan kronologi serta konten berita dengan kata kunci *Rohingya Crisis, US response in Rohingya Crisis, Myanmar Rohingya crisis*, serta pemberitaan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam krisis Rohingya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB. Pada BAB I pendahuluan, pemaparan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah serta pembatasan masalah. Berikutnya peneliti menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian peneliti melakukan kajian literatur dan kerangka pemikiran sebagai dasar pemikiran peneliti untuk

⁴⁶ Jim A. Kuypers, "*Framing Analysis*," *Rhetorical Criticism: Perspectives in Action*, Jim A. Kuypers, ed., Lanham, MD: Lexington Books, 2009), 181-204.

menganalisa penelitian ini. Bagian akhir BAB pendahuluan berisikan metode dan teknik pengumpulan data.

Pada BAB II, akan dianalisa lebih dalam peliputan media berita daring Amerika Serikat dalam krisis Rohingya menggunakan metode *framing analysis* media berita yang akan dianalisa adalah CNN, The New York Times. Konsep *Labeling* atau *naming and shaming* akan dibahas pada bab ini guna meneliti nama atau istilah apa yang kemudian digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat.

BAB III akan berisi analisa hubungan antara penyajian berita atau *framing* di Amerika Serikat dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat menggunakan *policy-media interaction model*, serta analisa diskursus kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Terdapat pengaplikasian hasil dari BAB II yang berkesinambungan dengan BAB II. BAB IV penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah di jelaskan pada BAB I, II, dan III.